

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM-Press.
- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Amiruddin dan H. Zaenal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harsono, Budi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Ismaya, Samun. 2013. *Hukum Administrasi Pertanahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kolopaking, Anita D. A. 2013. *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Limbong, Bernhard. 2011. *Pengadaan Tanah untuk Pembanguna*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- . 2012. *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Murad, Rusmadi. 2013. *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*. Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju.
- Salle, Aminuddin. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Kreasi Total Media.
- Santoso, Urip. 2005. *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Predana Media.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetami, A Siti. 2007. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

- Sumardjono, Maria S. W. 2009. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Syah, Mudakir Iskandar. 2007. *Dasar-Dasar Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Jala Permata.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2004. *Metodologi Peneilitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Ganindha, Ranitya. 2016. "Urgensi Pembentukan Kelembagaan Bank Indonesia sebagai Alternatif Penyediaan Tanah bagi Masyarakat untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9, No. 3. Desember 2016.
- Istijono, Bambang. 2014. "Lahan Menjadi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Rekayasa Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas*, Vol 10, No. 2. Oktober 2014.
- Kusumo, Aghisni Panji Hadi. 2013. "Tinjauan Yuridis Terhadap Subtansi Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Mengalami Judicial Review". *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 3. 2013.
- Santoso, Urip. 2016. "Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 21, No. 1, Septemer 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- . Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
- . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- . Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum.
- . Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum.
- . Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- . Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- . Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- . Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- . Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum.

D. Internet

<http://www.murianews.com/2014/09/23/6526/luas-lahan-versi-bpndanwarga-berbeda.html>, diakses pada 17 April 2017